

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI DI INSTITUT PAHLAWAN 12

Bambang Ari Satria

Institut Pahlawan 12, Sungailiat, Indonesia

*Korespondensi : bambangsatria09@gmail.com

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi merupakan program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik namun memiliki keterbatasan ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, meningkatkan prestasi mahasiswa dan meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Institut Pahlawan 12 merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dengan jumlah 101 mahasiswa hingga tahun 2023. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola beasiswa, mahasiswa penerima beasiswa dan orang tua wali. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edward III dengan empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12 sudah berjalan dengan baik. Dari aspek komunikasi ada pembinaan dan evaluasi berkala yang dilakukan setiap semester dan dari aspek sumber daya ada pembina, pengelola dan forum mahasiswa beasiswa yang memantau secara berjenjang capaian akademik yang diperoleh para mahasiswa.

Kata Kunci : Implementasi; Pendidikan Tinggi; Program Indonesia Pintar.

ABSTRACT

The Smart Indonesia Higher Education Program is an educational assistance program from the government for high school/ equivalent graduates who have good academic potential but have economic limitations. The aim is to increase the expansion of access and learning opportunities for students who are economically disadvantaged, increase student achievement and increase the gross enrollment rate in higher education. The Pahlawan 12 Institute is one of the universities in the Bangka Belitung Islands Province that accepts the Smart Indonesia Higher Education program with a total of 101 students until 2023. The aim of this research is to determine the implementation of the Smart Indonesia Higher Education program at the Pahlawan 12 Institute. Research This method uses a qualitative descriptive approach. The informants in this research were scholarship managers, scholarship recipient students and guardians. Data collection methods are through observation, in-depth interviews and documentation studies. The theory used in this research uses the implementation of George Edward III's theory with

four aspects, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the research show that the implementation of the Indonesia Smart Higher Education program at the Pahlawan 12 Institute has gone well. From the communication aspect there is regular training and evaluation which is carried out every semester and from the resource aspect there are supervisors, managers and scholarship student forums who communicate in stages about the academic achievements obtained by the students.

Keywords : *Implementation; Higher Education; Smart Indonesia Program*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang melalui proses pembelajaran agar mahasiswa aktif untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. (Amelia dkk, 2023). Satu diantara faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah karena kurangnya peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi. (Aliyah et al, 2020).

Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang digulirkam oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada lulusan SMA/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi kepada mahasiswa, yang berupa uang dan diberikan kepada perorang mahasiswa (Utami, 2021). Pendidikan merupakan pemegang dan pendukung yang penting dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara serta aspek kehidupan manusia seluruhnya. (Tasyak, 2022). Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan kelanjutan dari program bantuan mahasiswa miskin yang

sebelumnya bernama beasiswa bidik misi.

Pendidikan merupakan serangkaian usaha yang sangat efektif untuk mencapai kemajuan bangsa akan berwujud secara nyata dengan usaha untuk menciptakan ketahanan nasional. Keberhasilan suatu sistem pendidikan dikatakan baik dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan dan memiliki kemauan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi yang dapat dilihat berdasarkan temuan di lapangan mengenai program KIP-Kuliah (Sucita, 2021).

Pesatnya perkembangan zaman akan tidak berguna apabila tidak diikuti dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompeten untuk bersaing dalam dunia global (Nurhayati, 2022). Secara umum di Indonesia kebijakan publik yang telah dirumuskan mempunyai tujuan-tujuan yang luhur dan baik bagi masyarakat. Akan tetapi, seringkali yang menjadi permasalahan adalah pada tahap implementasi kebijakan (Roziqin Ali dkk, 2019). Salah satu faktor pemicu kurangnya dukungan terhadap pendidikan adalah

faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan membuat masyarakat tidak bisa mengakses pendidikan dengan leluasa. Kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya minat masyarakat dalam mengakses pendidikan. Tentu, pendidikan memiliki peran penting dalam memberantas permasalahan kemiskinan. Untuk mendorong program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pada pemerintahan Jokowi maka diperlukan upaya yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat secara umum (Rizal Dimas dkk, 2024)

Beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi yaitu dengan rendahnya kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang memiliki dampak pada rendahnya penghasilan sehingga menyulitkan untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh layanan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan pada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Di dalam undang-undang juga telah diatur tentang sistem pendidikan di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 “bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Pelaksanaan program KIP K juga masih memiliki tantangan dan perlu terus

diperbaiki. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KIP Kuliah antara lain adanya kasus penyalahgunaan atau pemalsuan kartu, kurangnya sosialisasi tentang program ini di daerah-daerah tertentu, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana yang disalurkan melalui program KIP K (Saprianto dkk, 2023)

Untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi dan memberikan masa depan yang lebih baik kepada calon mahasiswa miskin, maka diawarkanlah program beasiswa kuliah KIP (Anwar dkk, 2023). Dengan demikian, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar ialah merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya pernah ada yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program ini bertujuan guna meningkatkan akses Pendidikan anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan dan ikut serta mencegah anak putus sekolah.

Peserta yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan KIP Kuliah selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan diperlukan klasifikasi dalam menentukan penerima bantuan KIP Kuliah (Suganda dkk, 2022). Kebijakan dari program kartu Indonesia pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang kerap kali terjadi karena masih banyak siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sangat rentan terhadap terjadinya putus

sekolah. Hal ini disebabkan karena perekonomian keluarga yang tidak mampu serta kurang mendukung, sehingga anak tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah. Sumber dana dari program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang fisibel terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah asalkan uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas masalah kebijakan yang ada dilapangan (Fadilah, dalam Abdal, A., 2015).

Pada pemberian beasiswa ini tidak asal-asalan diberikan kepada mahasiswa. Tetapi beasiswa ini juga memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan beserta dengan persyaratan (Yusuf, 2022). Salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki mahasiswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi adalah Institut Pahlawan 12. Terdapat 101 mahasiswa yang menerima bantuan program Indonesia pintar Pendidikan Tinggi.

Tabel 1. Rekap Data Penerima Beasiswa PIP Pendidikan Tinggi Institut Pahlawan 12

No	Angkatan	Jumlah
1	2020	32
2	2021	25
3	2022	22
4	2023	12

Sumber: diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1. tersebut, rincian mahasiswa penerima program

Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12 yakni 32 mahasiswa pada angkatan 2020, 25 mahasiswa pada angkatan 2021, 22 mahasiswa pada angkatan 2022 dan 12 mahasiswa pada angkatan 2023. Mereka tersebar pada program studi Ilmu Administrasi Negara dan program studi Ilmu Komunikasi.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filosofi post positivisme yang digunakan dalam mengkaji keadaan objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilengkapi dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Institut Pahlawan 12. Proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi menurut (Moleong, 2017) adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, file dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian. Dokumen yang diperoleh antara lain Buku Pedoman Pelaksanaan KIP-Kuliah 2020, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar serta Surat Keputusan Rektor

Institut Pahlawan 12 tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-Kuliah Tahun 2020 hingga tahun 2023.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Thomas Dye sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini mengandung makna bahwa:

- 1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta,
- 2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh instansi pemerintah.

Chandler dan Plano menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik ialah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebutkan David Easton (1965) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: para administrator, penasehat, para raja dan sebagainya. Easton mengatakan mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang

yang terlibat dalam urusan Sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari agar kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel (Rodiyah, 2021).

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dikarenakan melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. William Dunn mengemukakan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan publik.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah itu didefinisikan untuk dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Solusi pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai pilihan kebijakan.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak solusi kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, akhirnya di dapat satu alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan mayoritas legislatif,

dan putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diputuskan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya manusia dan finansial. Dalam tahap ini beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan dari para pelaksana namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dengan tujuan untuk mensejahterakan, menertibkan, serta menanggulangi permasalahan yang terjadi. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah selesai. Sedangkan pengertian lainnya implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup tiga hal yaitu: pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi seperti sarana dan prasarana dan penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, bagaimana menyampaikan kebijakan tersebut secara lengkap ke masyarakat. Implementasi pada

hakikatnya upaya pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dengan demikian implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan yang ditetapkan. Menurut Ripley dan Franklin implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Grindle memberikan pandangannya tentang tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai hasil dari pemerintah. Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk suatu perintah atau keputusan yang sumbernya dari eksekutif atau keputusan lembaga pengadilan. Lazimnya, keputusan tersebut menjabarkan masalah-masalah yang ingin diatasi, menjelaskan dengan tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi kebijakan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang kerap kali dipergunakan. Terkait prinsipnya terdapat dua jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Yang pertama ialah implementasi yang memiliki pola “dari

atas ke bawah (*top-bottom*)” dan yang kedua “dari bawah ke atas (*bottom-up*)”.

Model Implementasi George C Edward III

Menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Menurut George C Edward III komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan maksud agar mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian tujuan dari sebuah implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat Keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Para pembuat keputusan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan tidak terlepas dari bagaimana caranya mereka berkomunikasi yang baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan harus disampaikan kepada pelaksana yang tepat. Dalam penerapannya kebijakan komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat kebijakan mauapun implementornya dapat konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Transformasi yaitu cara penyampaian informasi yang baik kepada para pelaksana kebijakan sehingga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Kejelasan yaitu dimana dalam indikator ini informasi yang diterima para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membuat

bingung sehingga mereka memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsistensi dimana informasi yang sudah diberikan kepada pelaksana kebijakan harus dikerjakan secara konsisten dan jelas.

2) Sumber Daya

Meskipun suatu implementasi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun apabila didalam pengimplementasiannya terdapat kekurangan sumber daya maka implementasi tidak bisa berjalan dengan efektif. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi suatu implementasi kebijakan terdiri dari:

a) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan suatu kebijakan sangat bergantung dengan sumber daya manusia yang dimiliki, karena apabila dibandingkan dengan sumber daya yang lain seperti anggaran, material dan lain-lain yang kurang banyak artinya apabila sumber daya manusianya yang mengolah kurang mempunyai rasa profesional yang tinggi atau tidak kompeten.

b) Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor seperti kejujuran, komitmen dan demokratis. Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan namun juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya.

- 4) Struktur Birokrasi
Birokrasi sebagai pelaksana dalam sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang sudah diputuskan secara politik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama yang baik dengan banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka selanjutnya yang terjadi adalah sumber daya yang ada tidak dapat berjalan dengan efektif. Struktur birokrasi yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

4. Program Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia pintar merupakan program pemerintah yang akan di berikan kepada pelajar dengan keluarga yang dana pendidikannya masih di bawah tingkat kepatuhan (sari, 2023). Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar merupakan komitmen pemerintah yang sejalan dengan 9 agenda prioritas nawa cita pemerintahan presiden Jokowi yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah meluncurkan sebuah beasiswa bernama KIP-K untuk membantu mendanai pendidikan mahasiswa Indonesia dari golongan yang kurang mampu (Larasati dkk, 2022).

Beasiswa KIP kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses pada pendidikan tinggi sehingga calon mahasiswa kurang mampu dapat memiliki masa depan yang lebih baik (Amin Ahmad dkk, 2022). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu dalam membiayai pendidikannya. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut KIP ialah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang KKS sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K. Terkait pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota masing-masing. Pemberian bantuan melalui KIP maupun bantuan pendidikan lainnya bertujuan untuk mendukung program wajib belajar dengan meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat

meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan tentunya berdampak pada peningkatan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan tinggi maka perlu dilakukan evaluasi program. Evaluasi program merupakan salah satu fungsi pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar ini. (harlina, 2023)

Tujuan dari program ini antara lain: meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat/rintisan wajib belajar 12 tahun, meringankan biaya personal pendidikan, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesusahan ekonomi. Konsep implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan rencana yang akan dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga, terutama kebijakan dan rencana yang berkaitan dengan lembaga nasional, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung rencana dalam mencapai tujuan.

Menurut Grindle (dalam Agustino, 2016) implementasi adalah proses umum dari perilaku administrasi yang dapat dipelajari dan dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditentukan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah disiapkan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal implementasi kebijakan, (Wijayanti & Jannah, 2019) mengungkapkan bahwa implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Isi kebijakan meliputi manfaat, jenis manfaat perubahan yang diharapkan, pengambilan keputusan, pelaksana rencana dan sumber daya.

Menurut Rippley dan Franklin (dalam Subarsono, 2005) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu: a. Perspektif kesesuaian yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana. b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan kurangnya masalah. c. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memenuhi semua pihak, terutama kelompok penerima program.

Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Demikian halnya, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa indikator keberhasilan seperti yang disampaikan oleh George Edward III. Pada bagian pembahasan ini disajikan dari hasil pengolahan data dan penemuan lapangan yang peneliti jalankan mengenai implementasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12.

Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980). Menurut George Edward III (dalam Widodo, 2011) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses menyampaikan perintah atau instruksi pembuat keputusan kepada mereka yang diberi kekuasaan dan tanggung jawab

untuk melaksanakan kebijakan. Pada indikator komunikasi, peneliti menganalisis berbagai macam unsur yang berhubungan didalamnya yakni proses komunikasi yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, komunikasi antara pelaksana terjalin dan terkoordinir dengan baik karena sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan KIP Kuliah dan komunikasi kepada penerima juga terjalin karena saat dilakukan sosialisasi pihak pelaksana memberikan kontak person sehingga apabila ada pertanyaan ataupun kendala bisa langsung menghubungi pihak pengelola. Tak hanya itu, dari segi komunikasi, ada pertemuan berkala yang dilakukan antara mahasiswa penerima beasiswa dengan pengelola beasiswa. Pertemuan berkala juga dihadiri orang tua/wali mahasiswa penerima beasiswa untuk memantau dan menyampaikan hasil perkembangan akademik yang diterima mahasiswa beasiswa KIP Kuliah di Institut Pahlawan 12. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan semester berjalan. Komunikasi lainnya yakni ada sosialisasi mengenai PIP Pendidikan Tinggi seperti pernyataan salah satu mahasiswa penerima KIP-Kuliah 2020 yang menyatakan bahwa ada sosialisasi mengenai KIP-Kuliah di sekolahnya. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari implementor, peneliti menganalisis dan menemukan hasil akhir bahwa komunikasi program KIP-Kuliah sudah cukup jelas dan terjalin sehingga dapat dipahami oleh berbagai pelaksana dan kelompok sasaran terkait. Komunikasi terkait program KIP- Kuliah perlu terus ditingkatkan agar seluruh siswa yang ingin

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi khususnya di Institut Pahlawan 12 dapat mengetahui adanya program ini.

Sumber Daya

Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip oleh La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat, disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi- sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019). Implementasi suatu kebijakan akan mengalami kesulitan jika sumber daya tidak memadai. Menurut Edward III (dalam Purwanto & Sulistyastuti, 2012) bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi program KIP-Kuliah di Institut Pahlawan 12, Bagian Kemahasiswaan Institut Pahlawan 12

berperan sebagai pelaksana program, yang terdiri dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kabag Kemahasiswaan, dan Staf Kemahasiswaan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pengelola di Institut Pahlawan 12 sudah memadai dan adanya kerjasama yang terjalin antara pengelola dalam pelaksanaan program KIP-Kuliah.

b. Sumber Daya Anggaran

Adapun mekanisme penganggaran program KIP Kuliah terdapat 2 penganggaran, yaitu untuk biaya hidup dan biaya UKT. Mekanismenya; Operator mengusulkan siapa saja yang berhak menerima KIP Kuliah sampai ke proses pencairan dana yang dilakukan setiap semester. Setelah itu di SK-kan oleh Rektor yang kemudian datanya di upload oleh operator ke sistem yang dimana datanya langsung ke Puslapdik dan diproses oleh LLDikti Wilayah II Palembang dan kemudian diteruskan ke Puslapdik. Dana ditransfer langsung oleh Puslapdik. Untuk biaya UKT, Puslapdik langsung mentransfer ke rekening Institut Pahlawan 12, sedangkan untuk biaya hidup langsung ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan implementor, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa indikator sumber daya anggaran sangat memadai dan mendukung implementasi program KIP-Kuliah di Institut Pahlawan 12. Kecukupan tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari pihak sasaran yaitu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah. Para mahasiswa penerima

KIP Kuliah juga merasa sangat terbantu dengan adanya program ini.

c. Sumber Daya Peralatan

Untuk mendukung pelaksanaan program KIP-Kuliah diperlukan peralatan yang memadai seperti ruangan, komputer, dan jaringan internet. Maka peneliti pun melakukan wawancara terkait tersedianya alat pendukung yang memadai pelaksanaan program KIP-Kuliah dan peneliti menemukan bahwa peralatan sudah memadai karena para pelaksana memiliki komputer dan jaringan internet yang stabil.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat pendukung yang tersedia sudah memadai sehingga pelaksanaan program KIP-Kuliah dapat berjalan dengan baik.

d. Sumber Daya Wewenang

Untuk menjalankan program KIP Kuliah di Institut Pahlawan 12, LLDikti Wilayah II Palembang memberikan wewenang sepenuhnya kepada pelaksana KIP di Institut Pahlawan 12 untuk mengelola dan menyalurkan KIP Kuliah kepada mereka yang berhak mendapatkannya agar dana tersalurkan tepat sasaran.

Disposisi

Edward III (dalam Wibawa, 2012) mengatakan jika implementasi kebijakan ingin efektif dan efisien, maka pelaksana tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan dan juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari kelompok pelaksana dan

kelompok sasaran. Kelompok pelaksana yang berkaitan dengan KIP-Kuliah khususnya pelaksana di Institut Pahlawan 12 adalah bagian kemahasiswaan, terdiri dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kabag Kemahasiswaan, dan Staf Kemahasiswaan. Sedangkan kelompok sasaran adalah calon mahasiswa yang mempunyai KIP, berasal dari keluarga miskin namun memiliki prestasi akademik yang bagus, dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai terkait disposisi atau sikap pelaksana yang mencakup rasa antusias yang dimiliki oleh para pelaksana KIP Kuliah di Institut Pahlawan 12 dalam melaksanakan tugasnya demi menghasilkan program KIP yang efektif dan efisien.

Hasil wawancara dengan berbagai implementor dapat peneliti analisis bahwa pemahaman implementor selaku pelaksana utama mengenai program Kartu Indonesia Pintar Kuliah cukup baik, terlihat dari adanya keinginan untuk dapat melaksanakan program dengan tepat waktu, tepat sasaran, merata serta berusaha untuk melaksanakan program secara maksimal. Sikap dari berbagai implementor tentunya sangat berarti terhadap program ini karena dengan dukungan yang diberikan masing-masing implementor tersebut akan berusaha untuk bisa mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Weber dalam (Bakti, Ode, & Elwan, 2018), Sumber legitimasi dari birokrasi berasal dari aturan yang berlaku (legalitas formal). Dalam konsep Weber birokrasi sebagai

aparatur administratif mempunyai peran yang menentukan tumbuh dan berkembangnya organisasi tersebut, sehingga perhatian Weberian ini lebih kepada struktur (birokrasi) yang telah diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. (Bakti et al., 2018) Demikian halnya, menurut Edward III (dalam Winarno, 2012) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu: *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Program KIP Kuliah merupakan program pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu peneliti mewawancarai mengenai peran para pelaksana dalam pelaksanaan program KIP Kuliah yang dikatakan bahwa sebagai salah satu pelaksana kebijakan, pengelola berperan dalam hal mensosialisasikan KIP Kuliah kepada para satuan pendidikan dan kemudian para satuan pendidikan mensosialisasikan kembali kepada calon mahasiswa yang ada di sekolahnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana KIP- Kuliah di Institut Pahlawan 12 berjalan dengan baik.

Tabel 2. Implementasi PIP Pendidikan Tinggi Institut Pahlawan 12

No	Aspek	Hasil
1	Komunikasi	Ada pembinaan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap

		semester
2	Sumber Daya	Sumber daya manusia diperoleh dari komponen pengelola beasiswa, pembina beasiswa. Sumber daya finansial berupa dana beasiswa yang digulirkan baik dana bantuan pendidikan yang masuk ke rekening kampus dan biaya hidup yang masuk ke rekening mahasiswa. Sumber daya fasilitas berupa wadah komunikasi melalui WhatsApp Group.
3	Disposisi	Komitmen yang tinggi dalam mengupayakan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12.
4	Struktur Birokrasi	Pengelola beasiswa membuat strukturisasi Program yang teratur

Sumber: diolah peneliti, 2024

D. KESIMPULAN

Implementasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12 sudah berjalan dengan baik. Dari aspek komunikasi, dilakukan pembinaan dan evaluasi berkala setiap semester dengan mengumpulkan semua mahasiswa penerima beasiswa beserta

orang tua wali dalam rangka penyampaian capaian akademik dalam setiap semester berjalan. Aspek sumber daya, khususnya sumber daya manusia ada pembina, pengelola dan forum mahasiswa beasiswa yang memantau secara berjenjang capaian akademik mahasiswa. Diharapkan pihak pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12 untuk memastikan sosialisasi program tersebut dapat disampaikan dengan massif dan diterima oleh para calon mahasiswa di setiap satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdal, A. 2015. Kebijakan publik: Memahami konsep kebijakan publik. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Aliyyah Rusi Rusmiati, et.al. 2020. Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*. 3(1): 37-54
- Amelia Fika, Jarudin, Liza Husnita. 2023. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(2): 18409-18413
- Amin Ahmad, Rambat Nur Sasongko, Armi Yuneti. 2022. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk

- Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu. *Alignment: Journal Of Administration And Educational Management*. 5(1): 98-107
- Anwar Pricilia, Usman Moonti, Abdulrahim Maruwae. 2023. Pengaruh Pogram Beasiswa KIP Kuliah terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. 6(10): 8084-8090
- Harlina Erli, Heru Purnawan, Evsa Wulan Suri. 2023. Evaluasi Pelaksanaan Kip Kuliah Tahun 2022 (Studi Di Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. 1(2): 27-34
- Larasati Ajeng Diah, et.al. 2022. Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*. 5(1): 1-22
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati Dwi, Sri Yuliani. 2022. Peran Aktor Kebijakan dalam Implementasi Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*. 2(1): 19-33
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi
- Rizal Dimas Ahmad, Riski Eka Purnairawan. 2024. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements*. 1(1): 25-40
- Rohmah Eva Nur Laily dan Zuli Kasmawanto. 2022. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*. 14(1): 85-104
- Rodiyah. 2021. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 7(2): 425-434
- Roziqin Ali, Irfan Murtadho Yusuf. 2019. Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. 8(2): 110-122
- Saprianto Ringgo, et.al. 2023. Implementasi KIP Kuliah Pada Mahasiswa/I Universitas

- Palangkaraya. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*. 1(2): 251-266
- Sari Diana, Afriyana Nuralfiah, Nayla Syarifah. 2023. Kajian Literatur: Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Progam Kartu Indonesia Pintar. *Jimba : Jurnal Sosial Dan Humaniora*. 1(1): 12-20
- Sucita Reghitama. 2021. Implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-Kuliah) Di Universitas Riau. *Journal Publicuho*. 4(4): 1112-1120
- Suganda Gagan, Marsani Asfi, Ridho Subagio Taufiq, Ricky Perdana Kusuma. 2022. Penentuan Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Menggunakan Naïve Bayes Classifier. *JSiI / Jurnal Sistem Informasi*. 9(2): 193-199
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tasyak Ulyatun. 2022. Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponggok Kabupaten Klaten. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. 11(4): 73-85
- Utami Yullya Putri. 2021. Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*. 10(1): 1-12
- Yusuf Erwani, Wulan Sari. 2022. Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*. 1(3): 189-196.